

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBYEK
WISATA BERBASIS MASYARAKAT (*COMMUNITY BASED TOURSM*)
STUDY WISATA HIU PAUS DESA LABUHAN JAMBU KECAMATAN
TARANO KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai persyaratan
Untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh:

PURNADI
21513A0059

**PROGRAM STUDY ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI



Judul Skripsi : Strategi Pemerintah desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) Study Wisata Hiu Paus Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa 2018

Nama Mahasiswa : Purnadi
Nomor Induk Mahasiswa : 21513A0059
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

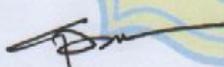
Dinyatakan bahwa skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram untuk diajukan ke sidang skripsi.

Mataram, 20 Mei 2019

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

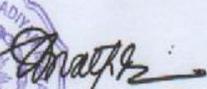
Pembimbing Pendamping,


Lalu Sopan Tirta K, S.IP., M.Si
NIDN. 0825038303


M. Awaludin, S.AP., M.Si
NIDN.

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBYEK
WISATA BERBASIS MASYARAKAT (*COMMUNITY BASED TOURSM*)
STUDY WISATA HIU PAUS DESA LABUHAN JAMBU KECAMATAN
TARANO KABUPATEN SUMBAWA 2018



Disusun dan diajukan oleh;

PURNADI
NIM. 21513A0059

PROGRAM STUDY
STUDY PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal, 25 Mei 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Tim penguji,

1. Lalu Sopan Tirta K, S.IP., M.Si Ketua (.....)
NIDN. 0825038303
2. M. Awaluddin, S.AP., M.Si Anggota I (.....)
NIDN.
3. Drs. H. Darmansyah, M.Si Anggota II (.....)
NIDN. 0008075914

Mengesahkan
Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purnadi

NIM : 21513A0059

Jenjang : S 1

Prodi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Mataram, 25 Mei 2019

Yang menyatakan



Purnadi
(21523A0059)

MOTTO

جَرَهُ أَوْ يُعْطَى مِ سَنَ لِأَنْ رُ : لِمِ أَلِ طَا ، حَمَةَ أَلِ طَالِبُ : لِعِلْمِ أَلِ طَا
لِنَبِيِّنَ أَمَعَ

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.

(HR. Dailani dari Anas r.a)

لِنَفْسِهِ يُجَاهِدُ فَإِنَّمَا جَاهِدَ وَمَنْ

“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”

(Qs. Al-Ankabut: 6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur tercurah pada-Mu ya Rabb. Karena rahmat, hidayah dan inayah-Mu peneliti dapat mencurahkan inspirasi dalam skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam yang akan senantiasa kita nantikan safaatnya di yaumul qiyamah.

Dalam menyelesaikan skripsi peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik moril, materil dan spiritual. Baik dalam bentuk bimbingan, arahan dan data-data yang berguna dalam penelitian skripsi ini. Tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak dapat terselesaikan.

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

Bapak dan ibu tercinta, yang telah mendidik, mendoakan dan memberikan kasih sayang serta menjadi panutan yang baik untukku.

Untuk yang terkasih saudara dan suadariku.

*Sahabat dan rekan- rekan seperjuanganku, ilmu pemerintahan 2015.
Serta Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Mataram yang
kubanggakan.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan rencana penelitian yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Toursm*) Study Wisata Hiu Paus Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa 2018” ini dapat diselesaikan.

Dalam penulisan rencana penelitian ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M. Pd. selaku Rektor Universitas.
2. Bapak Drs. Amil, M.M. selaku Dekan Program Study Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP. selaku Ketua Program Study Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Lalu Sopan Tirta K, S.IP., M.Si. selaku Dosen pembimbing utama yang telah memberikan petunjuk, saran dan pengarahan dalam penyelesaian proposal penelitian.
5. Bapak M. Awaluddin, S.AP., M.Si. selaku Dosen pembimbing pendamping atas segala nasehat dan saran serta kritik yang diberikan selama bimbingan.
6. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Husain dan Bunda Rukiati yang memberi motivasi, dukungan dan doa, terima kasih atas segalanya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian Amin Robbalalamin.
7. Seluruh dosen pengajar serta pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Seluruh teman-teman kampus seperjuangan khususnya yang tidak bias penulis sebut namanya satu per satu, terimakasih atas bantuan dan persahabatan yang tak kan pernah penulis lupakan.
9. Dan Terimakasih penulis ucapkan terhadap teman-teman lainnya, baik yang berada di Universitas maupun diluar Universitas Muhammadiyah lainnya.

Penulis menyadari penyusunan rencana penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga rencana penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pihak-pihak yang membutuhkan.



Mataram, 25 Mei 2019

Penulis
(Purnadi)
21513A0059

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBYEK
WISATA BERBASIS MASYARAKAT (*COMMUNITY BASED TOURSM*)
STUDY WISATA HIU PAUS DESA LABUHAN JAMBU KECAMATAN
TARANO KABUPATEN SUMBAWA 2018**

PURNADI

Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Pengembangan pariwisata mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan daerah sekitar obyek wisata, karena dapat bertindak sebagai industri sektor utama, yaitu sektor unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah seperti meningkatkan pendapatan asli daerah. Akan tetapi pergerakan industri pariwisata di Pulau Sumbawa khususnya di Desa Labuhan Jambu saat ini masih belum begitu menggeliat. Selain lemah di bidang promosi, lesunya industri pariwisata di daerah setempat juga karena lemahnya pemberdayaan dalam keterlibatan masyarakat serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kawasan wisata Desa Labuhan Jambu. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap mengelola industri pariwisata masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan; (1) mengetahui bagaimanakah strategi pemerintah desa dalam pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat (*Community Based Toursm*); (2) mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat strategi pemerintah desa dalam pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat (*Community Based Toursm*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Data diperoleh menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan; (1) pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat (*Community Based Toursm*) sudah diterapkan dan dilaksanakan sesuai prinsip dari konsep pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Toursm*); (2) Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Toursm*) masih terdapat beberapa hambatan yaitu rendahnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Labuhan Jambu sehingga sulit untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Toursm*) serta Fasilitas Terbatas (Sarana dan Prasarana).

Kata Kunci : Strategi Pemerintah Desa, Community Based Tourism

**VILLAGE GOVERNMENT STRATEGY IN COMMUNITY BASED
TOURISM DEVELOPMENT OF LABUHAN JAMBU VILLAGE SHOP
TOURISM STUDY, TARANO DISTRICT, SUMBAWA DISTRICT 2018**

PURNADI

Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

Tourism development has a considerable influence on the development of the area around tourism objects, because it can act as a main sector industry, namely a leading sector that is able to improve the economy of the community and the region such as increasing local revenue. However, the movement of the tourism industry on Sumbawa Island, especially in Labuhan Jambu Village, is still not stretching. Besides being weak in the field of promotion, the sluggishness of the tourism industry in the local area is also due to weak empowerment in community involvement and the lack of facilities and infrastructure in the tourist area of Labuhan Jambu Village. The quality of Human Resources (HR) that is ready to manage the tourism industry is still limited. This study aims to describe; (1) knowing how the village government strategies in developing community-based tourism objects (Community Based Tourism); (2) find out what are the factors that hinder the strategy of the village government in developing community-based tourism objects (Community Based Tourism). This study used a descriptive qualitative approach with the determination of informants using purposive techniques. Data obtained using in-depth interviews, observations and documentation. The results of the study show; (1) the development of community-based tourism objects (Community Based Tourism) has been implemented and implemented according to the principles of the concept of community-based tourism (Community Based Tourism); (2) In developing community-based tourism (Community Based Tourism) there are still some obstacles, namely the low human resources (HR) in Labuhan Jambu Village, making it difficult to develop community-based tourism (Community Based Tourism) and Limited Facilities (Facilities and Infrastructure).

Keywords: Village Government Strategy, Community Based Tourism

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.2 Latar Belakang Masalah	1
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Strategi	13
2.2.2 Pemerintah Desa	22
2.2.3 <i>Community Based Tourism</i> (Pariwisata Berbasis Komuniti)	27
2.3 Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Lokasi Penelitian	35

3.3 Fokus Penelitian	36
3.4 Teknik Penentuan Informan Penelitian.....	36
3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Sumber Data.....	39
3.7 Tehnik Analisa Data	40
3.8 Validasi Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.1.1 Profil Desa Labuhan Jambu.....	45
4.1.2 Geografis Desa Labuhan Jambu.....	46
4.1.3 Keadaan Sosial Desa Labuhan Jambu.....	47
4.1.4 Potensi Pariwisata Di Desa Labuhan Jambu	52
4.2 Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Tourism-CBT</i>) di Desa Labuhan Jambu..	56
4.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Tourism-CBT</i>)....	57
4.2.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Tourism-CBT</i>)....	62
4.2.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pengambilan Manfaat Pariwisata Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Tourism-CBT</i>).....	66
4.3 Faktor Penghambat Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Wisata Hiu Paus Berbasis Masyarakat Di Desa Labuhan Jambu.....	70
4.3.1 Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Labuhan Jambu	70
4.3.2 Fasilitas Terbatas (Sarana dan Prasarana)	73

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	76
5.1.1 Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Tourism</i>) Di Desa Labuhan Jambu	76

5.1.2 Faktor Penghambat Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Tourism</i>) di Desa Labuhan Jambu	78
5.2 Saran	79

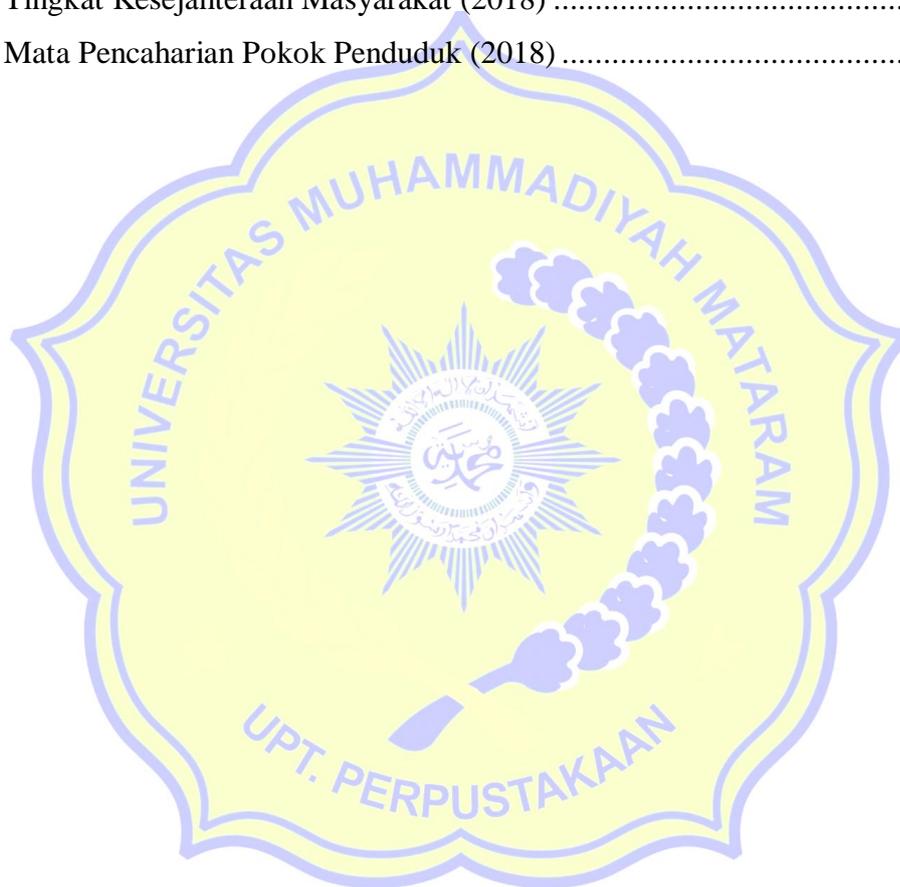
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1.1 Pelayanan Jasa Wisata Oleh Masyarakat	5
1.2 Komposisi KK Menurut Pendidikan.....	7
4.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	47
4.2 Populasi Penduduk Menurut Kelompok Umur (2018).....	48
4.3 Jumlah KK Menurut Status Pendidikan.....	49
4.4 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (2018)	50
4.5 Mata Pencaharian Pokok Penduduk (2018)	51



DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir Penelitian	33
4.1 Peta Batas Desa Labuhan Jambu	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Indonesia yang berada di antara 6° LU 11° LS dan antara 95° BT 141° BT merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri atas sekitar 17.508 buah pulau dengan garis pantai sepanjang sekitar 95.181 km. Total luas wilayah Indonesia tersebut adalah sekitar 9 juta km² yang terdiri dari 2 juta km² daratan dan 7 juta km² lautan yang terbentang dari barat ke timur sepanjang 5.110 km dari utara ke selatan sejauh 1.880 km. Namun ironisnya mayoritas penduduk pesisir di Negara yang sedang berkembang justru berada dalam garis kemiskinan. Dalam perkembangannya, wilayah pesisir seharusnya tidak hanya menjadi lingkungan nelayan yang kumuh akan tetapi dapat dikembangkan menjadi wisata bahari yang bernilai ekonomi tinggi. (Soegiarti, 1982; Polnain, 1983 dalam N. Erna Marlia Susfenti)

Pengembangan industri pariwisata sendiri mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan wilayah di daerah sekitar obyek wisata, karena dapat bertindak sebagai industri sektor utama, yaitu sektor unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian daerah seperti meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi dari pengunjung dan pihak swasta. Agar tidak menjadi daerah yang tertinggal, dengan potensi daerah di sektor pariwisata yang dimiliki daerah tersebut, harusnya dapat menjadi suatu batu loncatan untuk mengembangkan

daerah tersebut dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata yang ada.

Pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* (CBT) di Indonesia merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat setempat dengan perencanaan yang partisipatif. Definisi *community based tourism* (CBT) yaitu model pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal dengan memberi kesempatan dalam mengelola dan membangun pariwisata, sehingga distribusi keuntungan merata kepada komunitas di pedesaan/pesisir dan pulau-pulau kecil. (Putri Fistyaning Army, 2016)

Dalam upaya pengembangan pariwisata di Indonesia, pemerintah membuat beberapa kebijakan tentang pariwisata, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025,
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata,
- 4) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian,
- 5) Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata,
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat, Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum dalam kawasan perdesaan, dan kepentingan umum dalam kawasan perdesaan secara partisipatif, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pembangunan pariwisata bahari merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Tahun 2000 sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi sebesar Rp. 128,31 triliun atau sebesar 9,38% dari total PDB Indonesia yang sebesar Rp. 1.368 triliun. (Dimjati, 2003:68, dalam Imroatu Choiroh Masula, 2017)

Indonesia memiliki 34 provinsi dan terdiri dari pulau-pulau yang mana di setiap daerah memiliki potensi pariwisata yang memiliki daya tarik tersendiri, salah satunya di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah dengan potensi pariwisata yang besar dan menawarkan berbagai obyek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi, salah satunya wisata bahari khususnya wisata hiu paus yang baru-baru ini diluncurkan untuk mendukung acara Sail Moyo-Tambora 2018 yang digelar pada 9-23 September 2018, sekaligus sebagai promosi pariwisata Sumbawa. (Hasil observasi peneliti)

Desa Labuhan Jambu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. Desa ini terdiri dari lima dusun didominasi oleh suku bugis dengan mata pencaharian utama nelayan dan petani. Desa pesisir dilewati jalan negara, sangat strategis dan mudah dijangkau dengan transportasi darat baik angkutan umum atau pun mobil pribadi dengan estimasi perjalanan dua jam dari Kota Sumbawa. Selain wisata hiu paus, Desa Labuhan Jambu merupakan salah satu desa dengan potensi wisata pantai, perairan dan kepulauan. Pantai Ketapang, Pulau Rakit, Pulau Dewa, dan Pulau Bako merupakan aset yang dapat menjadi peluang terciptanya iklim pariwisata di Desa Labuhan Jambu. Dengan ditetapkan Desa Labuhan Jambu sebagai desa wisata khusus bahari pemerintah membentuk kelompok sadar wisata yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengambil langkah dalam membangun iklim pariwisata dengan pemberdayaan masyarakat sebagai faktor utama keberhasilannya. (Hasil Observasi Peneliti)

Desa Labuhan memiliki peluang mencapai keberhasilan Pariwisata Berbasis Masyarakat mengingat belum ditemukannya pihak swasta yang berperan secara dominan dalam bidang penyediaan jasa pariwisata terpadu serta keinginan kuat dari masyarakat. Sehingga dapat diindikasikan iklim pariwisata yang akan tercipta merupakan hasil upaya, dikelola, dan diambil hasilnya secara utuh oleh masyarakat secara langsung. Dapat dijelaskan pula bahwa Pariwisata Berbasis Masyarakat yang dikembangkan akan menciptakan peluang mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengatur pemasaran, penjualan, dan pendapatan.

Secara nyata beberapa bentuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang bisa disediakan secara mandiri oleh masyarakat adalah:

Tabel 1.1 Pelayanan Jasa Wisata Oleh Masyarakat

No	Kelompok	Deskripsi
1.	Bagan dan Perahu Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan bagan yang sudah ada • Kompensasi: IDR 400,000 untuk 2galbox umpan, IDR 300,000 untuk tenaga bagan, IDR 100,000 untuk BBM, IDR 20,000 untuk penyediaan sarapan pagi wisatawan (mie rebus, kue, dan the)
2.	Homestay	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana homestay dengan memanfaatkan 1 kamar untuk 1 tamu dari rumah-rumah penduduk • Tidak ada bangunan baru untuk akomodasi • Memberikan pelayanan kamar, kamar mandi, minum (air, teh, kopi) • Kompensasi IDR 100,000/orang/malam
3.	Pemandu	<ul style="list-style-type: none"> • Kompensasi IDR 100,000/orang
4.	Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan yang telah ada • Kompensasi sewa mobil IDR 500,000/rute • Kompensasi IDR 550,000 sewa bego untuk PP
5.	Produk lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Asli produk labuan jambu (bahan dan pembuat) • Kompensasi gantungan kunci IDR 20,000 dan terasi IDR 20,000
6.	Kuliner	<ul style="list-style-type: none"> • Olahan produk makanan dan minuman nusantara dan lokal

(Sumber : Surat Keputusan Kepala Desa Labuan Jambu)

Desa Labuhan Jambu juga menawarkan berbagai pesona alam dan tradisi budaya salah satunya, *Basaturen* yaitu sebuah upacara ritual yang dilaksanakan di pantai dalam bentuk pemberian sesajian yang dibuang ke laut. Kentalnya kearifan lokal masyarakat mewarnai nuansa keramah tamahan warga sekitar. Makanan khas seperti lawar dan buras labu juga dapat ditemui di rumah makan setempat. Keistimewaan desa terdapat pada aktivitas nelayan bagan dan pengolahan hasil tangkapan seperti ikan asin dan terasi. Selain itu, Desa Labuhan

Jambu juga memiliki keindahan alam bawah laut bagi wisatawan untuk melakukan, *island hopping*, *snorkeling*, dan *outbond* yang baru-baru ini disediakan guna meningkatkan daya tarik bagi wisatawan. (Hasil Observasi Peneliti)

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan Desa antara lain bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; serta memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; (UU nomor 6 th 2014 pasal 4).

Pergerakan industri pariwisata di Pulau Sumbawa khususnya di Desa Labuhan Jambu saat ini masih belum begitu menggeliat. Selain lemah di bidang promosi, lesunya industri pariwisata di daerah setempat juga karena lemahnya pemberdayaan dalam keterlibatan masyarakat serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kawasan wisata Desa Labuhan Jambu. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap mengelola industri pariwisata masih terbatas. Pemerintah masih memiliki tantangan berat yakni meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia demi menciptakan pelayanan yang prima terhadap wisatawan. Hal itu penting dilakukan, selain harus membenahi tata kelola pariwisata yang belum begitu optimal. (Hasil Observasi Peneliti)

Tabel 1.2 Komposisi KK Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Tamat Sekolah	32	120	152
2	Tamat SD	290	106	396
3	Tidak Tamat SLTP	90	7	97
4	Tamat SLTP	70	9	79
5	Tidak Tamat SLTA	110	9	119
6	Tamat SLTA	90	6	97
7	Tamat Perguruan Tinggi	45	4	49
Total		727	261	988

(Sumber : Data Penduduk Desa Labuhan Jambu 2018)

Berdasarkan tabel di atas, komposisi tingkat pendidikan penduduk, tertinggi ditempati kategori tamatan SD atau sederajat sebanyak 396, kemudian secara berurutan diikuti tidak atau belum tamat SD sebanyak 152, tamatan SLTP atau sederajat 79, tamatan SLTA atau sederajat 97, dan terakhir tamatan Diploma, S1, S2, dan S3 sebanyak 49. Dari data tersebut dapat digunakan untuk menghitung dan mengetahui bagaimana potensi sumber daya manusia di Desa Labuhan Jambu yang akan sangat berguna bagi kepentingan daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dalam kajian ini, peneliti lebih difokuskan pada **“Strategi Pemerintah desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) Study Wisata Hiu Paus Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2018”** dengan lebih mengedepankan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, sehingga diharapkan mampu memberikan

manfaat yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat setempat secara merata dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi permasalahan di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada kajian tentang:

1. Bagaimanakah Strategi Pemerintah desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) Study Wisata Hiu Paus Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2018?
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor – faktor penghambat Strategi Pemerintah desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) Study Wisata Hiu Paus Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Strategi Pemerintah desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) Study Wisata Hiu Paus Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor – faktor penghambat Strategi Pemerintah desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (*Community*

Based Toursm) Study Wisata Hiu Paus Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan penelitian ini diharapkan bermanfaat, yaitu:

1. Secara Teoretis

Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh konsep teoretik sebagai konsepsi fundamental menuju kajian lebih lanjut yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*).

2. Secara Praktis

Hasil penulisan penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi masyarakat, pemerintah dan swasta terutama dalam upaya optimalisasi sektor pariwisata dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat di desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa dalam upaya meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

3. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat untuk menambah referensi bagi keputakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti menemukan penelitian dengan judul yang relevan seperti judul penelitian penulis. Dengan ini peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

No	Nama dan Tahun Peneliti,	Judul Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dan Sekarang		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1.	Asep syaiful bahri. 2014	Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pariwisata Di Pantai Sawarna, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian ini lebih ke model partisipasi masyarakat dalam pariwisata, sementara penulis melakukan penelitian tentang strategi pemerintah dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat Lokasi penelitian terdahulu adalah 	Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pariwisata di Pantai Sawarna ini adalah 3,98. Hal ini berarti dalam mengelola informasi sebagai bagian dari partisipasi masyarakat berada dalam tingkat setuju.

				di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.	
2.	Sugi Rahayu, dkk. 2015	Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Tourism</i>) Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi • Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Tourism</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini lebih ke Model pengembangan CBT sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, sementara penulis lebih ke-strategi pengembangan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. • Lokasi penelitian terdahulu adalah di Kabupaten Kulon Progo. 	Kabupaten Kulon Progo memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi CBT. Potensi tersebut berupa wisata alam (<i>back to nature</i>), kesenian tradisional, kerajinan, wisata religi, wisata pendidikan dan wisata minat khusus (<i>special interest</i>). Dalam Upaya pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Kulon Progo dilakukan melalui: (1) program pengembangan pariwisata, (2) pengembangan pemasaran pariwisata, dan (3) pengembangan kemitraan pariwisata.
3.	Cintania Mongkol. 2015	Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan potensi Wisata Budaya Di Kabupaten Minahasa	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data wawancara secara mendalam, dan observasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini lebih ke Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan potensi Wisata Budaya, sementara penulis lebih ke Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat • Lokasi penelitian terdahulu adalah di Kabupaten Minahasa 	Dari penelitian ini disimpulkan bahwa ketidak berhasilan bersumber pada tidak dilaksanakannya berbagai standar pengembangan kepariwisataan yang seharusnya dilakukan (pengembangan infrastruktur, promosi, dan penguatan sumber daya manusia, pelibatan sektor swasta).
4.	N. Erna Marlia Susfenti. 2016	Pengembangan Desa Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • metode yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini lebih ke 	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

		Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism-Cbt) Di Desa Sukajadi Kecamatan Carita	adalah analisis deskriptif	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat, sementara penulis lebih ke Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian terdahulu adalah di Desa Sukajadi Kecamatan Carita 	peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata terlihat masih dominan, padahal bila mengacu kepada tata kelola kota pemerintah seharusnya hanya menjadi fasilitator, sedangkan pelaksanaan dan pengawasan diserahkan kepada masyarakat. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism – CBT) sangat perlu sekali diterapkan agar masyarakat merasakan dan mendapatkan manfaat dari adanya desa wisata.
5.	Ade Jafar Sidiq & Risna Resnawaty, (2017)	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat	• Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif	• Penelitian ini lebih ke Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal, sementara penulis lebih ke Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat 	Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat belum terwujud di wilayah ini. Masyarakat belum menjadi subjek utama pembangunan, namun masih menjadi objek pembangunan. Hal ini disebabkan kesempatan untuk berpartisipasi masih terbatas. Kerana untuk berpartisipasi masih belum terbuka lebar. Masyarakat merasa terganggu oleh perubahan yang terjadi tanpa memiliki kemampuan untuk turut terlibat dalam pembangunan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Dimensi Strategi

James Brian Quinn, analisis strategi militer diplomatik dan analogi-analogi yang serupa dalam bidang lain menyediakan beberapa wawasan penting ke dalam dimensi dasar, sifat dan desain strategi formal. Pertama, strategi efektif mengandung tiga unsur penting :

1) Tujuan

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi/instansi. Tujuan merupakan salah satu dimensi yang dapat menciptakan sebuah strategi karena penetapan tujuan sangat berkaitan langsung dengan strategi yang akan digunakan oleh sebuah organisasi atau instansi dalam pencapaian tujuannya dimana ketika tujuan sudah ditetapkan maka kita dapat mengetahui strategi yang akan digunakan.

2) Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian keputusan yang membimbing dan membatasi tindakan yang dilakukan. Kebijakan dibuat untuk menetapkan arah suatu tujuan yang ditetapkan sehingga pembuatan kebijakan lebih memudahkan untuk mengarahkan suatu organisasi atau instansi dalam menerapkan suatu strategi.

3) Program

Program merupakan urutan-urutan tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Program dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan-tindakan yang akan dilakukan sehingga strategi yang akan

diterapkan dapat terlaksana dengan maksimal. Strategi menentukan arah keseluruhan dan tindakan fokus organisasi, formulasinya tidak dapat dianggap sebagai generasi belaka dan keselarasan program untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pembangunan merupakan bagian integral dari strategi formulasi.

Kedua, strategi efektif mengembangkan beberapa konsep, kunci dan dorongan yang memberi mereka kohesi, keseimbangan, dan fokus. Beberapa tekanan bersifat sementara: lain yang dilakukan melalui strategi tahap akhir. Sumber daya harus dialokasikan dalam pola-pola yang menyediakan sumber daya yang cukup untuk setiap dorongan untuk berhasil terlepas dari rasio biaya relatif/keuntungannya. Unit organisasi harus terkoordinasi dan tindakan-tindakan yang dikendalikan untuk mendukung pola dorong yang dimaksudkan atau strategi total.

Ketiga, strategi berkaitan tidak hanya dengan tak terduga, tetapi juga dengan tidak dapat diketahui. Menurut Braybrooke dan Lindblom, (1963), untuk strategi perusahaan, analisis tidak bisa meramalkan cara yang tepat di mana semua kekuatan bisa berinteraksi satu sama lain., terdistorsi oleh sifat atau emosi manusia, atau dimodifikasi oleh imajinasi dan tujuan aksi balasan lawan cerdas. Tindakan rasional atau bagaimana rangkaian acara yang tampaknya aneh dapat berkonspirasi untuk mencegah atau membantu keberhasilan (White, 1978; Lindblom, 1959), Akibatnya, esensi dari strategi apakah militer, diplomatik, Bisnis, olahraga, (atau) politik adalah untuk membangun postur yang begitu kuat (dan berpotensi fleksibel) cara selektif

bahwa organisasi dapat mencapai tujuan meskipun cara-cara tidak terduga, kekuatan-kekuatan eksternal benar-benar dapat berinteraksi ketika saatnya tiba. Keempat, hanya sebuah organisasi militer yang memiliki berbagai eselon grand, teater, daerah, pertempuran, Infantri dan artileri strategi, jadi kompleks organisasi harus lain yang memiliki sejumlah hirarki terkait dan saling mendukung strategi (Vancil dan Lorange, 1975). Setiap strategi harus lebih atau kurang lengkap dalam dirinya sendiri, selaras dengan tingkat desentralisasi yang dimaksudkan. Namun masing-masing harus dibentuk sebagai elemen kohesif tingkat strategi yang lebih tinggi. Meskipun, mencapai total kohesi antara semua organisasi yang besar, strategi akan menjadi tugas yang luar biasa untuk setiap petugas kepala executive, sangat penting bahwa ada satu wadah yang sistematis untuk pengujian setiap komponen strategi dan melihat bahwa itu memenuhi prinsip-prinsip utama dari strategi dibentuk. (Ian Asriandi, 2016).

1. Manajemen Strategi

Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para pakar mengenai konsep manajemen strategi. Menurut Siagian (2005), manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian organisasi tersebut. Menurut Lawrence R. Jauch & W.F. Glueck (1984) manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi. (Irmawati dkk, 2013)

Berdasarkan beberapa pendapat para pakar, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi mengandung elemen-elemen sebagai berikut:

- 1) Misi dan harapan organisasi
- 2) Tujuan dan sasaran
- 3) Memperhatikan situasi strategis Lingkungan luar (*external environment*) dan lingkungan dalam (*internal environment*)
- 4) Strategi formulasi
- 5) Strategi evaluasi dan pilihan-pilihan Umumnya strategi evaluasi akan mengembangkan alternatif terbaik yang didasari faktor-faktor kritis untuk mencapai kesuksesan organisasi;
- 6) Strategi implementasi dan perencanaan;
- 7) Pengendalian strategis meliputi evaluasi atas implementasi.

Di dalam manajemen sebuah organisasi, strategi dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategis organisasi. Rancangan yang bersifat sistematis tersebut yang disebut perencanaan strategis. (Irmawati dkk, 2013)

2. Definisi Strategi

Pengertian “Strategi” bersumber dari kata Yunani Klasik, yakni ‘Strategos’ (Jenderal), yang pada dasarnya diambil dari pilahan kata-kata Yunani untuk “Pasukan” dan “Memimpin”. Penggunaan kata kerja Yunani yang berhubungan dengan “Strategos” ini dapat diartikan sebagai ‘perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang

efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki' (Bracker, 1980, dalam Ian Asriandi, 2016).

Salusu dan Young menawarkan suatu definisi yang lebih sederhana, yaitu:
'Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan''.

Kenichi Ohmae seorang pakar pemasaran sekaligus konsultan manajemen tersohor dan penulis buku *The End of Nation State* mengatakan :

'Strategi adalah keunggulan bersaing guna mengubah kekuatan perusahaan menjadi sebanding atau melebihi kekuatan pesaing melalui cara yang paling efisien'.

Adapun Benjamin Tregoe dan John William Zimmerman mendefinisikan strategi sebagai :

'kerangka yang membimbing dan mengendalikan pilihan-pilihan yang menetapkan arah serta karakteristik suatu organisasi'.

Gerry Jhonson dan Kevan Scholes menyatakan bahwa :

'strategi sebagai arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keuntungan melalui konfigurasi sumber daya lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan berbagai pihak'.

Menurut Glueck dan Jauch:

'strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan

lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi’.

Menurut McNichols:

‘strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan’.

Chandler mengatakan strategi adalah penetapan sasaran jangka panjang organisasi, serta penerapan serangkaian tindakan dan alokasi daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. (Ian Asriandi, 2016).

Dewasa ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis strategi yang diterapkannya, karena dalam arti yang sesungguhnya, manajemen puncak memang terlibat dalam suatu “peperangan” tertentu.

Menurut Henry Mintzberg, Joseph Lampel, James Brian Quinn, dan Sumantra Ghoshal (2003), menyajikan lima definisi strategi yaitu :

1) Strategi sebagai rencana

Strategi adalah rencana, semacam sadar dimaksudkan yang meliputi tindakan, pedoman (atau pedoman yang ditetapkan) untuk menangani situasi. Dengan definisi ini, strategi memiliki dua karakteristik penting: mereka dibuat sebelum tindakan yang menerapkan, dan mereka dikembangkan secara sadar dan sengaja. Sebagai rencana, strategi berkaitan dengan bagaimana pemimpin mencoba untuk menetapkan arah untuk organisasi, untuk mengatur mereka pada

tindakan yang telah ditentukan. Dalam mempelajari strategi sebagai rencana, kita harus entah bagaimana masuk ke dalam pikiran strategi, untuk mencari tahu apa yang benar-benar dimaksudkan.

2) Strategi sebagai taktik

Sebagai taktik, strategi membawa kita ke dalam wilayah persaingan langsung, dimana ancaman dan feints dan berbagai manuver lain bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Tempat ini proses pembentukan strategi dalam pengaturan yang paling dinamis, dengan gerakan memprovokasi dan seterusnya. Namun Ironisnya, strategi itu sendiri adalah sebuah konsep yang berakar tidak dalam perubahan tetapi dalam stabilitas dalam mengatur rencana dan pola didirikan.

3) Strategi sebagai pola

Tetapi jika strategi dapat dimaksudkan (apakah sebagai rencana umum atau khusus *ploys*), tapi mereka juga dapat terwujud. Dengan kata lain, menentukan strategi sebagai rencana ini tidak cukup; kita juga perlu definisi yang meliputi perilaku yang dihasilkan. Dengan demikian, definisi ketiga diusulkan: strategi adalah pola-khususnya, pola dalam aliran tindakan (Mintzberg dan Waters, 1985). Menurut definisi ini, strategi adalah konsistensi dalam perilaku, apakah atau tidak dimaksudkan.

Hal ini mungkin terdengar aneh definisi untuk kata yang telah begitu terikat dengan kehendak bebas. Tetapi faktanya adalah bahwa sementara hampir tidak ada yang mendefinisikan strategi dalam cara ini, banyak orang tampak pada

suatu waktu menggunakannya. Quinn (1980:35), mengatakan, pertimbangkan ini kutipan dari seorang eksekutif bisnis;

‘Secara bertahap pendekatan yang sukses menggabungkan ke dalam pola tindakan yang menjadi strategi kami. Kita tidak memiliki strategi keseluruhan’.

Komentar ini tidak konsisten hanya jika kita membatasi diri untuk salah satu definisi strategi, apa yang orang ini tampaknya katakan adalah bahwa perusahaan memiliki strategi sebagai pola, tapi bukan sebagai rencana.

Dengan demikian, definisi strategi sebagai rencana dan pola dapat cukup independen satu sama lain: rencana saya belum direalisasi, sementara pola mungkin muncul tanpa prasangka. Sebagai pola, bertitik berat pada tindakan. Strategi sebagai pola juga memperkenalkan gagasan tentang konvergensi, pencapaian konsistensi dalam perilaku organisasi. Menyadari strategi dimaksudkan, mendorong kita untuk mempertimbangkan gagasan bahwa strategi dapat muncul serta sengaja dikenakan.

4) Strategi sebagai posisi

Definisi keempat adalah strategi sebagai posisi-secara khusus, cara untuk menemukan sebuah organisasi, di teori organisasi suka menyebutnya "lingkungan". Dengan definisi ini, strategi menjadi mediasi antara organisasi dan lingkungan dalam konteks internal dan eksternal. Definisi strategi sebagai posisi dapat kompatibel dengan baik (atau semua) dari yang sebelumnya, posisi dapat dicentang dan bercita-cita untuk memikirkan rencana (atau taktik) atau dapat dicapai, mungkin bahkan melalui pola perilaku.

Sebagai posisi, strategi ini mendorong kita untuk melihat organisasi dalam lingkungan kompetitif mereka, bagaimana mereka menemukan posisi mereka dan melindungi mereka untuk memenuhi persaingan, menghindarinya, atau menumbangkannya. Hal ini memungkinkan kita untuk berpikir organisasi secara ekologis, sebagai organisme dalam ceruk yang berjuang untuk bertahan hidup di dunia permusuhan dan ketidakpastian serta simbiosis.

5) Strategi sebagai perspektif

Sementara definisi keempat strategi terlihat keluar, mencari untuk menemukan organisasi dalam lingkungan eksternal, dan turun ke posisi kelima terlihat di dalam organisasi, memang dalam kepala strategi kolektif, tetapi sampai dengan pandangan yang lebih luas. Di sini, strategi adalah perspektif, bukan hanya terdiri dari posisi pilihan, tetapi cara yang tertanam memahami dunia.

Definisi kelima ini menunjukkan bahwa semua konsep strategi memiliki satu implikasi penting, yaitu bahwa semua strategi adalah abstraksi yang hanya ada di pikiran pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk diingat bahwa tidak ada yang pernah melihat atau menyentuh strategi, setiap strategi adalah sebuah penemuan, khayalan dari imajinasi seseorang, apakah dirumuskan sebagai niat untuk mengatur perilaku itu berlangsung atau disimpulkan sebagai pola untuk menggambarkan perilaku yang telah terjadi.

Sebagai perspektif, strategi menimbulkan pertanyaan menarik tentang niat dan perilaku dalam konteks kolektif. Jika kita mendefinisikan organisasi sebagai tindakan kolektif dalam mengejar misi umum, kemudian strategi sebagai perspektif memunculkan masalah bagaimana menyebar niat melalui sekelompok

orang untuk menjadi bersama sebagai norma-norma dan nilai-nilai, dan bagaimana pola perilaku menjadi sangat tertanam dalam kelompok.

Seperti yang disarankan di atas, strategi sebagai posisi dan perspektif dapat kompatibel dengan strategi sebagai rencana dan/atau pola. Tapi, pada kenyataannya, hubungan antara definisi yang berbeda ini bisa lebih terlibat, tapi konsep strategi yang muncul adalah bahwa pola yang dapat muncul dan diakui menimbulkan sebuah rencana resmi, mungkin dalam perspektif keseluruhan.

Sementara berbagai hubungan yang ada antara definisi yang berbeda, satu hubungan, atau satu definisi diutamakan dibanding yang lain. Dalam beberapa hal, definisi ini bersaing (dalam artian bahwa mereka dapat menggantikan satu sama lain), tetapi mungkin cara yang lebih penting, mereka saling melengkapi. Masing-masing definisi menambahkan elemen penting untuk pemahaman kita tentang strategi, mendorong kita untuk mengatasi pertanyaan mendasar mengenai organisasi secara umum (Ian Asriandi, 2016)

2.2.2. Pemerintah Desa

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17), sehingga secara etimologi dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*continue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (*rasio*) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawaban atau aparatur susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112). Sedangkan kata desa

sendiri diambil dari bahasa india yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas menurut soetarjo dan yuliati (Richard C Allokendek dkk, 2016).

Dalam PP No 72 tahun 2005 mengatakan bahwa Pemerintah desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas perwakilan masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Sedangkan dalam Pasal 1 UU No 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pendapat para ahli disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah adalah adalah tata cara dalam memerintah wilayahnya sedangkan desa

adalah wilayah yang diperintahnya beserta masyarakatnya. Jadi pemerintah desa mempunyai hak untuk menjalankan urusan rumah tangganya sendiri yang diakui dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada Bab V mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disebutkan dalam Pasal 23 bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif, hal ini disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud di atas bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud, diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- 1) Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang di serahkan pengaturannya kepada desa;
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintahan provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- 4) Urusan pemerintahan lain yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) Menetapkan Peraturan Desa;
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- 14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Patut disadari, bahwa disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa memiliki kewajiban yang ditegaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- 7) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- 10) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 12) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 13) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 14) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- 15) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2.2.3. Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*)

1. Pengertian Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*)

Pariwisata Berbasis Masyarakat adalah suatu pariwisata dimana masyarakat sebagai obyek utama, pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, masyarakat memiliki peran di semua sektor pembangunan baik sebagai perencana, investor, pelaksana, pengelola, pengawas maupun evaluator. Akan tetapi meskipun pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pada faktor masyarakat sebagai pelaku utama, peran lainnya seperti peran dari pemerintah dan swasta diperlukan. Masyarakat yang tinggal dan menetap di daerah tujuan wisata memiliki peran yang sangat

penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan pariwisata di daerahnya. (Moh Ardhi Akbar, 2018)

Murphy dalam Sunaryo (2013: 139) menyebutkan bahwa pada hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri sehingga semestinya kepariwisataan harus dipandang sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas. Batasan pengertian pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* sebagai berikut:

- 1) Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada.
- 2) Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usahausaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada.
- 3) Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematis dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada di destinasi.

Sedangkan menurut Hudson dan Timothy (1999) dalam Sunaryo (2013:139) pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* merupakan pemahaman yang berkaitan dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki ketertarikan atau minat

kepada kepariwisataan setempat, dan tata kelola kepariwisataan yang memberi ruang kontrol yang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. (Sugi Rahayu, 2015)

Pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari atas dua perspektif, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari pembangunan pariwisata.

2. Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*)

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu konsep yang menjelaskan tentang pentingnya peranan komunitas dalam pembangunan pariwisata atau biasa disebut dengan *Community Based Tourism* (CBT). Secara konsep, prinsip dasar pembangunan pariwisata berbasis masyarakat merupakan dengan menempatkan masyarakat sebagai komponen utama yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam berbagai macam kegiatan kepariwisataan, sehingga manfaat dari kepariwisataan seluruhnya dapat diperuntukkan bagi masyarakat, dimana masyarakat atau penduduk setempat memiliki peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka. (Moh Ardhi Akbar, 2018)

Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) dikembangkan berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara berbagai pihak lain yang terlibat dalam pembangunan pariwisata termasuk pemerintah, swasta serta masyarakat. Secara konsep, prinsip pembangunan pariwisata berbasis masyarakat lebih menekankan pada pembangunan pariwisata dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam setiap tahapan pembangunan, yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pembangunan pengelolaan serta pengembangan sampai dengan monitoring dan evaluasi, masyarakat wajib dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk berperan didalamnya karena tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dari masyarakat.

Menurut I Gede Ardika, konsep CBT menjelaskan bahwa masyarakat bukan lagi menjadi obyek pembangunan saja akan tetapi sebagai penentu pembangunan itu sendiri, masyarakat akan mampu bangkit sendiri dari kemiskinan dan mengurangi tingkat ketergantungan pada faktor diluar.

3. Prinsip Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Comunity Based Tourism*)

Keterlibatan masyarakat lokal sebagai komponen utama dari prinsip pengembangan CBT, menurut Drake (1991) dapat dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap perencanaan (*planning stage*), tahap pelaksanaan (*implementation stage*), serta dalam hal pemanfaatan keuntungan (*share benefit*) baik itu secara ekonomi maupun sosial budaya.

- 1) Tahap perencanaan, pada tahap ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pengembangan yang memiliki peran aktif dalam tahap perencanaan.

Tahap perencanaan dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek serta meliputi tahap identifikasi masalah atau persoalan, identifikasi potensi pengembangan, serta pengembangan alternatif rencana dan fasilitas.

- 2) Tahap implementasi, bentuk partisipasi masyarakat terutama terkait dengan partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan program pengembangan atau pembangunan, pengelolaan objek atau usaha yang berkaitan langsung dengan kegiatan.
- 3) Aspek pada dampak manfaat, bentuk keterlibatan masyarakat dapat terwujud melalui peran dan posisi masyarakat yang mendapatkan nilai manfaat yang signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial budaya, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

Secara konseptual prinsip dasar pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat adalah dengan menempatkan masyarakat sebagai komponen utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aktifitas kepariwisataan, sehingga manfaat yang diperoleh dari kepariwisataan seluruhnya dapat diperuntukkan bagi masyarakat. target utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep *Community Based Tourism* lazimnya digunakan oleh para perancang pembangunan pariwisata sebagai srategi untuk mengarahkan komunitas agar lebih berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sebagai patner dalam industri pariwisata. Tujuan yang ingin dicapai adalah

pemberdayaan sosial dan ekonomi komunitas tersebut serta meletakkan nilai lebih dalam berpariwisata, khususnya kepada para wisatawan. (Moh Ardhi Akbar, 2018)

Kesimpulan yang diperoleh dari berbagai definisi tentang *community based tourism* (CBT) merupakan suatu obyek daya tarik wisata yang terwujud karena adanya inisiatif dan motivasi dari masyarakat setempat, dikelola oleh masyarakat lokal, dan bertujuan mengkonservasi lingkungan budaya masyarakat tersebut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Inisiatif dan motivasi dari masyarakat lokal untuk membentuk sebuah partisipasi yang menggerakkan CBT.

2.3. Kerangka Pikir Penelitian

Pariwisata Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka membantu pemasukan negara. Pariwisata sebagai suatu sektor ekonomi yang memiliki dampak berjenjang (*Multiplier effect*) mampu menghidupkan berbagai sektor ekonomi lainnya, seperti transportasi, perhotelan, kuliner, budaya dan lain sebagainya, selanjutnya pariwisata mampu menarik tenaga kerja yang banyak. Artinya, potensi pertumbuhan ekonomi akan semakin besar melalui pengelolaan pariwisata yang baik.

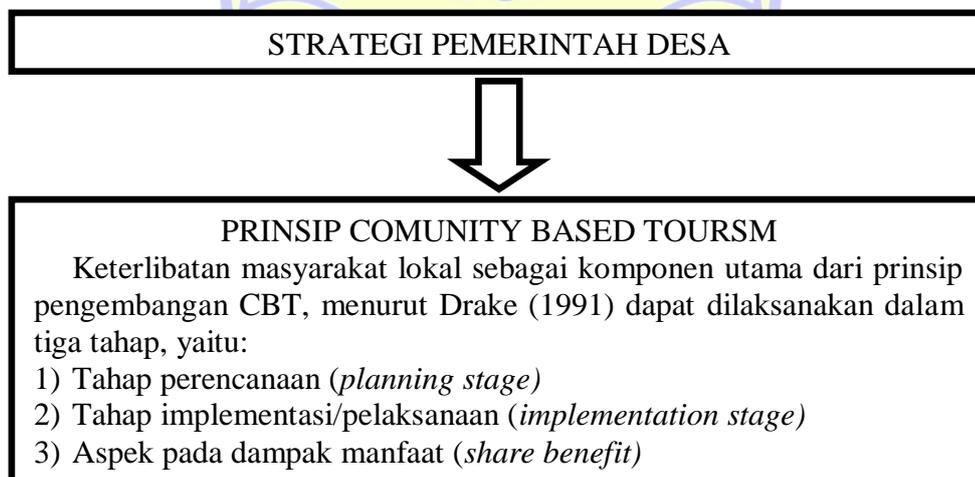
Pariwisata ini tentu saja tidak akan berjalan dengan sendirinya, namun dibutuhkan beberapa faktor penting pendukungnya. Salah satu faktor pendukung yang penting yaitu peranan pemerintah, baik itu dalam hal pembuatan kebijakan yang mendukung, maupun sebagai *promotor* utama ke dalam maupun ke luar

negeri. Melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah, diharapkan sektor pariwisata dari waktu ke waktu menjadi berkembang dan lebih kuat.

Melalui perannya sebagai *promotor*, pemerintah diharapkan mampu mengangkat potensi-potensi pariwisata di Indonesia yang dirasa masih belum optimal pengelolaannya. Sebagaimana dijelaskan Pendit (2003) bahwa peran pemerintah dan rakyat adalah penting dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di negara atau daerahnya. Artinya, pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan peningkatan sektor pariwisata, lalu rakyat harus selalu mendukung berbagai kebijakan.

Dengan melihat fakta fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, maka keberhasilan di sektor pariwisata tidak akan bisa dilepaskan dari peran Pemerintah selain sebagai motivator, juga untuk meningkatkan sebagai dinamisator, fasilitator, dan sekaligus implementor. Peran-peran tersebut direalisasikan melalui berbagai program demi tercapainya pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Bila disajikan dalam sebuah bagan, maka gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu untuk mendapatkan data dan mengumpulkan informasi yang selengkap mungkin dengan mendiskripsikan mengenai Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan data yang di dapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan dari penelitian akan tercapai.

Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen. Dalam penelitian ini tidak dipandu oleh teori tetapi oleh fakta fakta yang ditemukan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk (1) mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, (2) menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala, dan peristiwa yang terjadi di lapangan, (3) menyusun hipotesis berkenaan dengan konsep dan prinsip suatu bidang kajian berdasarkan data dan informasi yang didapat. Peneliti kualitatif memiliki daya tarik dalam meneliti fakta fakta dengan menggunakan strategi (Denita Octavia Sidabukke, 2018).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data yang berupa data

deskriptif yang tidak menggunakan data yang berupa angka untuk menerangkan hasil penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mendalam tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Untuk mencapai tujuan itu, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Fenomena itu dapat berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan masyarakat yang terlibat dalam pengembangan objek wisata Hiu Paus. Fenomena tersebut dituliskan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian objek wisata Hiu Paus karena pada awalnya objek wisata tersebut hanyalah sebatas tontonan bagi masyarakat yang menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan. Pengelolaan objek wisata tersebut bermula dari inisiatif Kepala Desa Labuhan Jambu yang ingin mengubah potensi tersebut menjadi Objek wisata bahari yang mempunyai nilai bagi masyarakat sekitar. Pengelolaannya pun dilakukan oleh masyarakat, selain itu saat ini objek wisata Hiu Paus memiliki spot-spot foto yang *instagramable*, sehingga banyak menarik pengunjung untuk datang dan menjadikannya objek wisata pedesaan yang banyak diminati.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan pada awal penelitian karena fokus penelitian memberikan batasan-batasan hal yang diteliti. Fokus penelitian berfungsi memberikan arahan selama proses penelitian, khususnya pada proses pengumpulan data untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada :

1. Pengembangan objek wisata Hiu Paus berbasis masyarakat (*community based tourism*) di Desa Labuhan Jambu dapat dilihat dari indikator :
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan
 - 2) Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan
 - 3) Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pengambilan Manfaat.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pengembangan objek wisata Hiu Paus berbasis masyarakat (*community based tourism*) bagi kelompok.

3.4. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada asas subjektif yang menguasai proses pengembangan objek wisata Hiu Paus dari awal pembangunan, memiliki data terkait objek wisata Hiu Paus dan bersedia memberikan informasi yang lengkap mengenai pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan objek wisata Hiu Paus. Berdasarkan kriteria tersebut maka informan dalam penelitian ini adalah :

1. Mereka yang mengambil bagian dalam proses pengembangan Objek wisata Hiu Paus yaitu : Kepala Desa, Ketua kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dan anggota yang terlibat dalam pengembangan objek wisata Hiu Paus

2. Mereka yang melakukan aktivitas perekonomian di Kawasan Objek Wisata Hiu Paus yaitu : Pedagang, penyediaan penginapan, dan perahu/bagan nelayan.
3. Mereka yang bertempat tinggal di sekitaran kawasan objek wisata Hiu Paus yaitu : masyarakat sekitar objek wisata.

Alasan mengapa mengambil informan dengan kriteria tersebut adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat, sebenar-benarnya, dan keseluruhan, sehingga dapat menjawab tentang pertanyaan peneliti mengenai strategi pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Sehingga metode yang digunakan dalam penentuan informan ini adalah menggunakan *purposive* yang artinya dalam penentuan informan dipilih dengan pertimbangan khusus oleh peneliti dengan mempertimbangkan karakteristik data berdasarkan kebutuhan analisis dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Hiu Paus dengan penerapan konsep *community based tourism* dalam pengembangannya dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang terlibat. Adapun informan yang akan diwawancarai yaitu kepala Desa ketua POKDARWIS,

dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka kepada informan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan objek wisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Peneliti tidak membatasi jawaban yang diberikan oleh informan sehingga informasi yang didapatkan lengkap dan mendalam.

Wawancara mendalam merupakan proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara informan dan pewawancara. Wawancara mendalam diharapkan akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian, yang dapat menjadi gambaran yang lebih jelas guna mempermudah dan menganalisis data selanjutnya. (Denita Octavia Sidabukke, 2018)

2. Observasi

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi objek wisata Hiu Paus dari pertama kali peneliti berkunjung ke wisata Hiu Paus, kemudian tertarik untuk mencari tahu awal pengembangan objek wisata Hiu Paus. Menurut Nasution menyatakan bahwa metode observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun Observasi ilmiah adalah perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau dengan maksud untuk menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah kaidah yang mengaturnya. Sehingga menjadi data yang menjelaskan keadaan penelitian dengan dukungan dokumentasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku mengenai pendapat. Sumber dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya foto-foto proses pengelolaan objek wisata, arsip-arsip yang terkait dengan objek wisata Hiu Paus yang dimiliki oleh kelompok sadar wisata (POKDARWIS). Dokumentasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data yang berbentuk tulisan, gambar atau karya karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan (Denita Octavia Sidabukke, 2018).

3.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek atau subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer didapatkan secara langsung oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara yaitu informasi yang dilontarkan oleh informan. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara menggunakan panduan wawancara yang disusun oleh peneliti guna mendapatkan data terhadap informan pada objek wisata Hiu Paus di Desa Labuhan Jambu.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penelitian dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip pemerintah Desa Labuhan Jambu, data berupa dokumentasi objek wisata dan rekaman dalam wawancara penelitian.

3.6. Teknik analisis Data

Sugiyono (2014), menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri serta orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis seperti yang telah diberikan oleh Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya

apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, *notebook*, dan lain sebagainya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, gambar dan kutipan wawancara. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi Data dan Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

kelengkapan mengumpulkan data , maka kesimpulan yang didapat merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. (Denita Octavia Sidabukke, 2018)

Tahapan–tahapan dalam analisis data diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga saling berhubungan antara tahapan satu dan tahapan lainnya. Analisis dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan objek wisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*).

3.7. Validasi Data

Menurut Afrizal (2014) validasi data berarti bahwa data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (dalam Denita Octavia Sidabukke, 2018) meliputi:

1. Kreadibilitas

Kriteria ini berfungsi untuk:1) melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai, 2) memperlihatkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan cara melakukan pembuktian terhadap kenyataan yang sedang diteliti. Kegiatan yang dilakukan peneliti agar hasil penelitiannya dapat dipercaya, yaitu dengan melakukan triangulasi.

Triangulasi merupakan upaya untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- 1) Triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Penelitian dalam tahap ini melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa narasumber yang posisinya berbeda sehingga informasi yang diperoleh dari narasumber yang satu dapat dibandingkan dengan informasi dari narasumber lainnya.
- 2) Triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu yang dilakukan melalui pengecekan dengan melakukan wawancara, observasi atau teknik dalam waktu atau situasi yang berbeda, baik dengan menggunakan bahan referensi maupun mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu dilakukan analisis dan penafsiran data :

2. Transferabiliti

Pemeriksaan keteralihan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks dimana lokasi penelitian dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan agar pembaca memahami hasil penelitian dengan

jelas sehingga pembaca dapat memutuskan apakah hasil penelitian tersebut dapat diaplikasikan ditempat lain.

3. Dependability

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hasil penelitian dinyatakan tidak *dependable* apabila data penelitian ada namun proses penelitian tidak ada atau penelitian tidak dilakukan.

4. Confirmability

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Pengujian *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan selama penelitian agar setiap hasil penelitian merupakan keluaran dari sebuah proses.